

SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PUSAT DAN DAERAH DALAM RANGKA MENJAGA STABILITAS INFLASI

Deputi Bidang Ekonomi
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Tahun 2019

Jakarta, 21 November 2019



OUTLINE



Perkembangan Inflasi Nasional

Kinerja Inflasi Daerah

Isu/Permasalahan dan Kebijakan Inflasi 2020

Sinkronisasi Perencanaan Inflasi dalam RKP 2020

Inflasi dalam Sasaran Pembangunan 2020-2024



PERKEMBANGAN INFLASI NASIONAL OKTOBER 2019 DAN *OUTLOOK* DESEMBER 2019

Okt 2019 **3,13%** Target APBN 2019
 Sep: 3,39%

Inflasi YoY

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
2017	3,49	3,83	3,61	4,17	4,33	4,37	3,88	3,83	3,72	3,58	3,30	3,61
2018	3,25	3,18	3,40	3,41	3,23	3,12	3,18	3,20	2,88	3,16	3,23	3,13
2019	2,82	2,57	2,48	2,83	3,32	3,28	3,32	3,49	3,39	3,13		

Inflasi YtD

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
2017	0,97	1,21	1,19	1,28	1,67	2,38	2,60	2,53	2,66	2,67	2,87	3,61
2018	0,62	0,79	0,99	1,09	1,30	1,90	2,18	2,13	1,94	2,22	2,50	3,13
2019	0,32	0,24	0,35	0,80	1,48	2,05	2,36	2,48	2,20	2,22		

Sumber: BPS (2019)

Outlook Inflasi Des 2019

3,23%
 Prediksi Bappenas

Permasalahan:

	CORE	VF	AP	Umum
YoY Okt 2019	3,20% Sep: 3,32%	4,82% Sep: 5,49%	1,58% Sep: 1,88%	3,13% Sep: 3,39%
MtM Okt 2019	0,17% Sep: 0,29%	-0,47% Sep: -2,26%	0,03% Sep: 0,01%	0,02% Sep: -0,27%



Penyebab:

Peningkatan permintaan rokok sebagai respons atas kebijakan peningkatan tarif cukai rokok di tahun 2020

Penyebab:

Peningkatan biaya tempat tinggal

Penyebab:

- Penurunan tarif angkutan udara
- Masih dalam masa *low season*

Penyebab:

- Penen beberapa komoditas strategis di sentra-sentra produksi (Aneka cabai) Kulogprogo, Magelang, Banyuwangi, Blitar, Malang
- Stok beras BULOG masih mencukupi pada tingkat 2,29 juta ton pada akhir Okt '19

Realisasi Inflasi TW II (% YoY)

Provinsi	2019		Provinsi	2019	
	Target ¹⁾	Realisasi ²⁾		Target	Realisasi ²⁾
DI Aceh	n.a	2,73	NTB	3,0 - 4,0	3,39
Sumut	n.a	5,87	NTT	3,0 - 3,4	1,35
Sumbar	5,0 -6,0	3,61	Kalbar	3.60	3,03
Riau	n.a	3,41	Kalteng	4,2-4,3	2,89
Jambi	3,5	2,60	Kalsel	n.a	3,99
Sumsel	2,0-4,0	2,14	Kaltim	n.a	2,72
Bengkulu	n.a	2,69	Kaltara	n.a	3,10
Lampung	4,75	2,76	Sulut	5	5,10
Babel	6,31	3,69	Sulteng	n.a	5,32
Kepri	5,0 -7,0	3,16	Sulsel	3,5-1,0	2,98
DKI Jakarta	3,6	3,49	Sultra	n.a	3,48
Jabar	3,0 - 4,0	3,48	Gorontalo	3,67	3,07
Jateng	3,5±1	2,52	Sulbar	n.a	0,54
DIY	n.a	3,11	Maluku	n.a	4,10
Jatim	n.a	2,40	Malut	n.a	1,64
Banten	n.a	3,72	Papua Barat	3,66	2,75
Bali	n.a	2,14	Papua	2,36	2,92

Nasional

Target APBN

3.50%

Realisasi TW II

3.34%

Inflasi daerah TW II Tahun 2019



Daerah masih diatas Inflasi Nasional dengan isu/permasalahan berulang

Sumber: Bank Indonesia

ISU STRATEGIS

- Faktor siklikal beberapa komoditas pangan strategis masih kuat
- Peningkatan nilai tambah tanaman pangan belum optimal
- Terdapat disparitas harga/inflasi yang cukup besar antardaerah
- Panjangnya rantai perdagangan dan struktur pasar

Keberlanjutan kebijakan reformasi subsidi energi

ARAH KEBIJAKAN 2020

- 1 Meningkatkan ketersediaan komoditas pangan strategis;
- 2 Memperkuat tata kelola sistem logistik nasional dan konektifitas antarwilayah;
- 3 Meningkatkan kerjasama antardaerah;
- 4 Menjangkar ekspektasi inflasi dalam sasaran yang ditetapkan
- 5 Meningkatkan kualitas data/statistik



Perlu Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah

0

4

PERLUNYA SINKRONISASI PERENCANAAN PUSAT & DAERAH

UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)



Kepres 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN)



Kementerian PPN/Bappenas memiliki tugas:

1

Melakukan **koordinasi & sinkronisasi perencanaan**, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi

2

Melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan

Permen PPN/Kepala Bappenas No.6 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Kebijakan Pengendalian Inflasi dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional

Kementerian PPN/Bappenas memiliki tanggungjawab:



Menyusun Perencanaan Kebijakan **Pengendalian Inflasi** untuk Jangka Pendek (RKP) dan Jangka Menengah (RPJMN)



Melalui **Pengendalian 4K**:

- Ketersediaan Pasokan
- Keterjangkauan Harga
- Kelancaran distribusi
- Komunikasi efektif



Prioritas Nasional



Program Prioritas



Kegiatan Prioritas

Lokasi

Pusat & Daerah

0

5

SINKRONISASI PERENCANAAN INFLASI DALAM RKP 2020 (1/6)

SASARAN INFLASI 2020



2,00-4,00%

(point estimate: 3,00%)

ARAH KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI



Meningkatkan produktivitas terutama pascapanen dan meningkatkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)



Menurunkan rata-rata inflasi dan volatilitasnya pada 10 komoditas pangan strategis



Menurunkan disparitas harga antardaerah dengan rata-rata harga nasional



Menjagkar ekspektasi inflasi dalam sasaran yang ditetapkan



Meningkatkan kualitas statistik pangan dan komoditas strategis lainnya

STRATEGI PENGENDALIAN INFLASI

- 1 Mempercepat penyelesaian masalah struktural
- 2 Mengelola permintaan dan ekspektasi masyarakat
- 3 Memperkuat produksi, cadangan pangan Pemerintah, dan Pengelolaan impor-ekspor pangan
- 4 Memperkuat kelembagaan
- 5 Meningkatkan kerjasama perdagangan antardaerah
- 6 Meningkatkan infrastruktur perdagangan
- 7 Memperbaiki kualitas data terkait komoditas pangan dan strategis lainnya
- 8 Memperkuat koordinasi pusat dan daerah

0

6

SINKRONISASI PERENCAAN INFLASI DALAM RKP 2020 (2/6)

Dalam RKP 2020 kebijakan inflasi dilaksanakan melalui empat prioritas nasional PN 1, PN 2, PN 3, dan PN 4



PN 1

Pembangunan Manusia
dan Pengentasan
Kemiskinan



PN 2

Infrastruktur dan
Pemerataan Wilayah



PN 3

Nilai Tambah Sektor
Riil, Industrialisasi dan
Kesempatan Kerja



PN 4

Ketahanan Pangan, Air,
Energi, dan Lingkungan
Hidup



PN 5

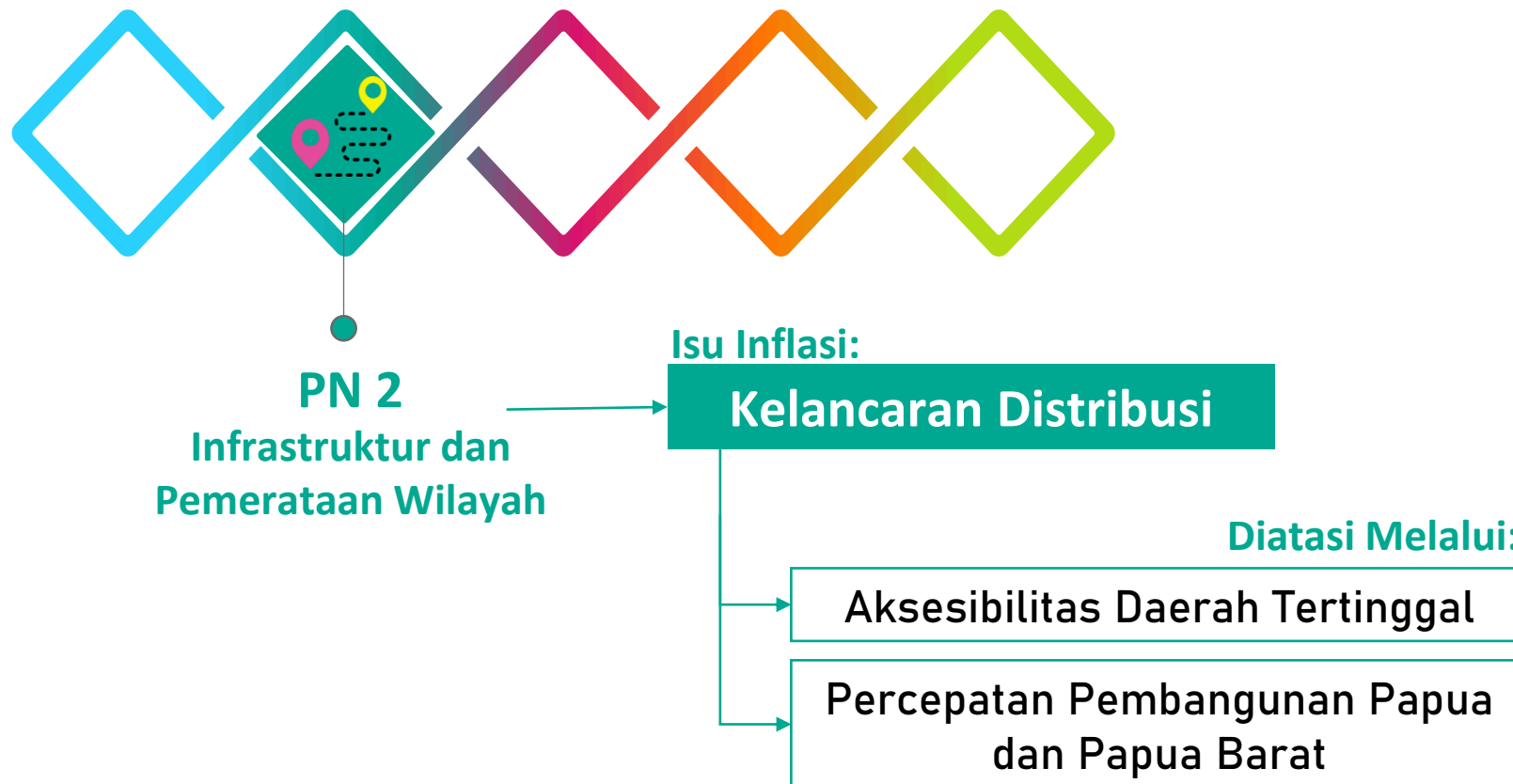
Stabilitas Pertahanan
dan Keamanan

TEMA: "Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas"

Kegiatan Prioritas untuk Mengatasi Isu Inflasi: Keterjangkauan Harga



Kegiatan Prioritas untuk Mengatasi Isu Inflasi: Kelancaran Distribusi



SINKRONISASI PERENCANAAN INFLASI DALAM RKP 2020 (5/6)

Kegiatan Prioritas untuk Mengatasi Isu Inflasi: Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, dan Kelancaran Distribusi



Isu Inflasi:

Ketersediaan Pasokan

Diatasi Melalui:

Peningkatan Industri Berbasis Pertanian Terintegrasi Hulu-Hilir

Isu Inflasi:

Keterjangkauan Harga

Diatasi Melalui:

Pengelolaan Impor

Penguatan Sistem Logistik & Stabilitas Harga

PN 3

Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi dan Kesempatan Kerja

Isu Inflasi:

Kelancaran Distribusi

Diatasi Melalui:

Peningkatan Kemitraan Usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar

Peningkatan Industri Berbasis Pertanian Terintegrasi Hulu-Hilir

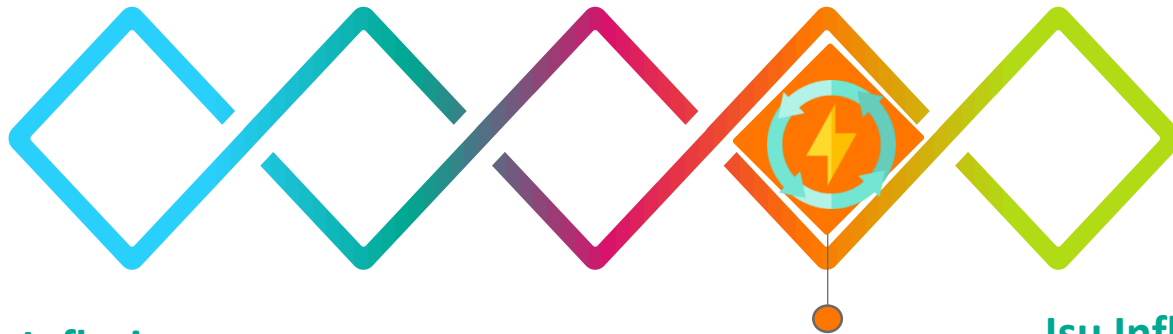
Penguatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga

1

0

SINKRONISASI PERENCANAAN INFLASI DALAM RKP 2020 (6/6)

Kegiatan Prioritas untuk Mengatasi Isu Inflasi: Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan Harga, dan Ketersediaan Pasokan



Isu Inflasi:

Kelancaran Distribusi

Diatasi Melalui:

Tata Kelola Sistem Pangan Nasional

Isu Inflasi:

Keterjangkauan Harga

Diatasi Melalui:

Tata Kelola Sistem Pangan Nasional

Penguatan Kesiapsiagaan Bencana

PN 4

Ketahanan Pangan, Air, Energi, dan Lingkungan Hidup

Isu Inflasi:

Ketersediaan Pasokan

Diatasi Melalui:

- Optimalisasi Pemanfaatan Waduk Multiguna.
- Peningkatan Produktivitas dan Keberlanjutan Sumber Daya Pertanian.
- Peningkatan Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian.
- Peningkatan Produksi dan Produktivitas Perikanan dan Produk Laut.
- Modernisasi Pengelolaan Air Irigasi.
- Peningkatan Produksi & Akses Minyak & Gas.
- Penguatan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana



INFLASI DALAM SASARAN PEMBANGUNAN 2020-2024:

PERANAN STABILITAS INFLASI DALAM MENCAPAI PEMBANGUNAN YANG BERKUALITAS/INKLUSIF

Pertumbuhan Ekonomi
(persen)

5,4 – 6,0



6,5 – 7,0

Tingkat Kemiskinan
(persen)

Gini Rasio
(indeks)

0,370 – 0,374



4,0 – 4,6

Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT)
(persen)

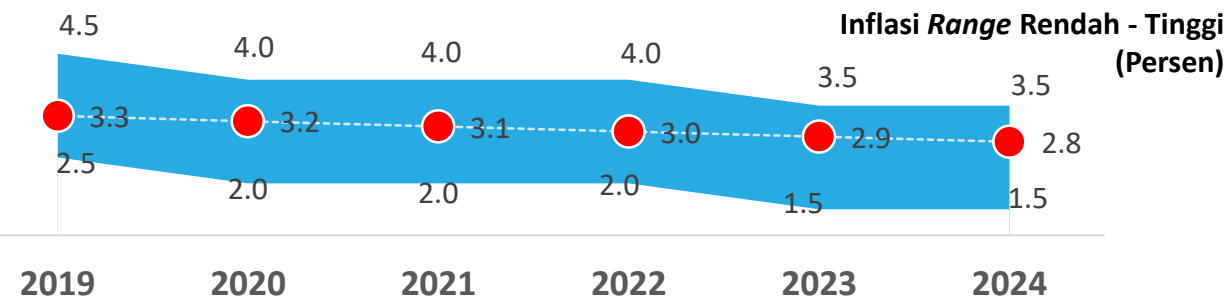
Indeks Pembangunan
Manusia (IPM)
(nilai)

75,54



Proyeksi Inflasi Jangka Menengah

Untuk mencapai target pembangunan, stabilitas inflasi dengan tren menurun menjadi prioritas. Pencapaian sasaran tersebut diupayakan melalui penyelesaian permasalahan struktural, pengelolaan ekspektasi, dan penguatan koordinasi.



TERIMA KASIH